

## **ANALISIS DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2010-2019**

**Arif Maulana<sup>1</sup> ; Nugrahayu Suryaningrum<sup>2</sup>**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Jl. Keramat Manjang No. 10, Barabai

E-mail : maulana127041@gmail.com

diterima: 8/1/2021; direvisi: 3/4/2021; diterbitkan: 26/3/2022

**Abstract:** Poverty in Indonesia is barrier factor in economic development. One of the successful indicators in the development is decreased poverty rate. This study aims to analyze the poverty level of South Kalimantan Province in 2010-2019. The data used are Poverty Rate, Unemployment Rate, human development index, Gross Regional Domestic Product (GRDP) per capita at constant prices, total population, Special Allocation Fund, and General Allocation Fund, 2010-2019. The analysis method used is panel data regression analysis. The results of the study show that the human development index and GRDP per capita have a negative effect, that means an increasing human development index and GRDP per capita will reduce the poverty rate. Meanwhile, the unemployment rate and special allocation fund have a positive effect, that means an increasing unemployment rate and special allocation fund will be followed by an increasing poverty rate.

**Keywords:** *Unemployment rate, GRDP per capita, human development index, special allocation funds, Panel Data Analysis*

### **PENDAHULUAN**

Kemiskinan menjadi masalah krusial dan bersifat global yang terjadi pada banyak negara termasuk Indonesia (Sari, 2018). Kemiskinan menggambarkan suatu kondisi masyarakat yang tidak hanya mempunyai tingkat penghasilan yang kecil, tetapi juga mempunyai akses yang terbatas baik terhadap kebutuhan dasar, kesehatan, pendidikan, serta kegiatan ekonomi (Susanti & Sartiyah, 2019). Kemiskinan Indonesia menjadi salah satu masalah prioritas yang sedang diupayakan pengentasannya oleh pemerintah (Puspita, 2015). Hal ini disebabkan pembangunan ekonomi Indonesia akan terhambat jika masalah terkait kemiskinan tidak diatasi (Purnomo, 2019).

Peran pemerintah dalam pembangunan suatu negara memiliki tujuan agar taraf hidup masyarakatnya meningkat. Berkurangnya tingkat kemiskinan suatu negara menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah

dalam membangun negaranya (Handalani, 2019).

Penelitian ini menganalisis determinan tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019. Hasil penelitian dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengambil kebijakan mengenai kemiskinan.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Menurut Paramita & Purbadharmaja (2015), kemiskinan diartikan sebagai kondisi kesulitan memenuhi kebutuhan hidup karena memiliki uang ataupun barang yang terbatas. Sementara Pateda et al. (2017) mendefinisikan kemiskinan sebagai rendahnya taraf hidup atau kondisi keterbatasan materi pada suatu individu atau kumpulan individu dibandingkan dengan taraf hidup yang berlaku umum di masyarakat. Dilihat dari perspektif ekonomi, kemiskinan merupakan kondisi kekurangan untuk mencukupi keperluan

serta meningkatkan kesejahteraan hidup seseorang atau sekelompok orang.

Badan Pusat Statistik (BPS) memakai *basic needs approach* atau kemampuan mencukupi keperluan dasar dalam menghitung tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana suatu individu tidak mampu secara ekonomi untuk mencukupi keperluan dasarnya diukur dari pengeluaran makanan dan non-makanan. Menurut BPS, penduduk dikategorikan miskin ketika mempunyai pengeluaran per kapita sebulan kurang dari garis kemiskinan. Definisi dari garis kemiskinan yaitu batas pengeluaran yang diperlukan untuk mencukupi keperluan kalori minimum yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan aktivitas, ditambah keperluan non-makanan (sandang, perumahan, transportasi, kesehatan, pendidikan, serta keperluan non-makanan lain) dengan menggunakan pendekatan data pengeluaran/konsumsi. Termasuk konsumsi adalah taksiran konsumsi barang/jasa yang berasal dari hasil produksi sendiri maupun yang diberi oleh pihak lain.

BPS mendefinisikan pengangguran sebagai penduduk tidak memiliki pekerjaan tapi sedang menyiapkan usaha atau saat ini sedang mencari kerja atau telah mendapatkan pekerjaan tapi belum mulai bekerja atau putus asa karena menganggap dirinya tidak mungkin memperoleh pekerjaan. Dampak negatif pengangguran yaitu menurunkan penghasilan suatu individu yang akan berefek pada penurunan tingkat kemakmuran individu tersebut. Menurunnya kemakmuran suatu individu akibat menjadi pengangguran tentunya akan memperbesar peluangnya untuk terperangkap dalam kemiskinan (Sukirno, 2015).

Jumlah pengangguran juga akan akan sebanding dengan tingkat kemiskinan karena ketidakmampuan

mengakses pendapatan yang layak dan berakibat pada mencuatnya kejadian kemiskinan (Handalani, 2019). Hal tersebut juga sebanding dengan penelitian (Puspita, 2015), (Purnomo, 2019), dan (Susanti & Sartiyah, 2019) yang mendapatkan temuan bahwa pengangguran dan kemiskinan mempunyai hubungan yang berlawanan serta signifikan.

PDRB per kapita menjadi salah satu parameter yang dapat mengukur kinerja pembangunan negara. PDRB per kapita adalah suatu nilai yang mengukur besarnya pendapatan yang diterima setiap individu. BPS mendefinisikan PDRB per kapita sebagai pembagian antara PDRB sebagai pembilang dan penyebutnya adalah jumlah penduduk suatu periode pada wilayah tertentu.

Teori terkait pengaruh peningkatan PDRB terhadap kemiskinan berawal dari kemunculan konsep *trickle-down effect* pada tahun 1950-an. Konsep *trickle-down effect* beranggapan bahwa pengaruh peningkatan PDRB akan terdistribusi ke setiap penduduk dan akan menurunkan tingkat kemiskinan (Škare & Družeta, 2016). Sebaliknya, rendahnya penghasilan per kapita akan mengakibatkan semakin tingginya angka kemiskinan. Penghasilan per kapita yang rendah sebagai akibat tingkat dari investasi per kapita yang masih kecil yang disebabkan oleh rendahnya permintaan domestik per kapita. Permintaan domestik per kapita rendah diakibatkan oleh tingginya tingkat kemiskinan dan seterusnya, dampak dari siklus tersebut akan menciptakan lingkaran kemiskinan akibat dari hubungan kausalitas. Hal tersebut sesuai dengan penelitian (Sari, 2018); (Azizah et al., 2018); (Bhattacharyya & Resosudarmo, 2015)(Bhattacharyya & Resosudarmo, 2015); dan (Suryahadi et al., 2009) yang menemukan bahwa peningkatan PDRB akan berdampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

*United Nations Development Programme* (UNDP) menyatakan IPM memiliki tiga dimensi dasar yang mengukur pencapaian setiap negara dalam membangun manusia, yaitu: (1) Dimensi umur harapan hidup saat lahir yang mengukur umur panjang dan kehidupan sehat. (2) Dimensi pengetahuan yang diukur dengan lama sekolah yang diharapkan serta rata-rata lama sekolah. (3) Dimensi standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita disesuaikan.

IPM memiliki nilai antara 0-100. IPM memiliki hubungan yang kuat dengan upaya pengentasan kemiskinan. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia akan dibarengi dengan peningkatan taraf serta kapabilitas sumber daya manusia (SDM). Peningkatan tersebut akan meningkatkan produktivitas masyarakat yang selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga akan terjadi penurunan tingkat kemiskinan (Arsyad, 2010). Ada beberapa penelitian yang menemukan adanya pengaruh variabel IPM terhadap pengentasan kemiskinan seperti penelitian (Pratama, 2015), (Purnomo, 2019); dan (Bakar, 2019).

Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa DAU merupakan uang yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Uang ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan kapabilitas anggaran antar daerah guna membiayai keperluan daerah dalam melaksanakan aturan desentralisasi. Sifat dari DAU yaitu "*Block Grant*" artinya bahwa pemakaian DAU dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sepenuhnya diserahkan kepada daerah. Tentunya pemakaian DAU harus cocok dengan prioritas kepentingan dan keperluan daerah agar pelayanan publik dapat meningkat (Aziz dalam Salindeho, 2016). Penelitian mengenai pengaruh

DAU terhadap kemiskinan yang dilakukan oleh (Ismail & Hakim, 2014) menghasilkan temuan terdapat pengaruh DAU terhadap tingkat kemiskinan.

Cara penghitungan DAU berdasarkan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut (Halim dalam Salindeho, 2016): (a) Dalam APBN, minimal 25 persen harus dialokasikan sebagai DAU. (b) Untuk daerah Provinsi, DAU dialokasikan sebesar 10 persen dan daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sebesar 90 persen dari keseluruhan DAU yang sudah dianggarkan. (c) Setiap daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia memiliki proporsi bobot yang digunakan untuk menetapkan jumlah DAU untuk daerah tersebut.

UU Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa DAK adalah uang yang berasal dari APBN dan ditetapkan ke suatu daerah khusus. Tujuan dari DAK adalah membantu daerah menyediakan dana untuk kegiatan tertentu atau khusus yang diusulkan oleh daerah dan tentunya sinkron dengan prioritas pada tingkat nasional (Sunarno dalam Salindeho, 2016).

DAK dapat dimanfaatkan daerah untuk peningkatan investasi yang berupa pembelian maupun pemeliharaan sarana dan prasarana untuk jangka panjang. Dalam suatu kasus khusus, DAK juga dapat digunakan untuk membantu memenuhi biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam periode kurang dari tiga tahun (periode yang terbatas) (Aziz dalam Salindeho, 2016). Penelitian mengenai pengaruh DAK terhadap kemiskinan dilakukan oleh (Ismail & Hakim, 2014) dan (Widianto et al., 2016) yang mendapatkan hasil penelitian yaitu terdapat pengaruh DAK terhadap tingkat kemiskinan.

Adapun kriteria dalam pengalokasian DAK berdasarkan Halim dalam Salindeho (2016) adalah sebagai berikut: (a) Dari segi kriteria secara umum, DAK diperhitungkan menurut

kapabilitas anggaran daerah, dapat terlihat berdasarkan penerimaan daerah yang telah dikurangi dengan belanja pegawai. (b) Dari segi kriteria secara khusus, DAK diperhitungkan menurut Undang-undang tentang otonomi khusus dan karakteristik daerah. (c) Dari segi kriteria secara teknis, DAK disusun menurut status kondisi infrastruktur dan tingkat pencapaian setiap daerah dalam melaksanakan kegiatan menggunakan DAK.

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu PDRB per kapita, IPM, DAU, dan DAK mempunyai pengaruh berbanding terbalik kepada Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mempunyai pengaruh sebanding kepada Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan.

### METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa data panel berupa gabungan 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan (*cross section*) tahun 2010 sampai 2019 (*time series*). Data yang digunakan mencakup: Tingkat Kemiskinan; TPT; IPM; PDRB atas dasar harga konstan; Jumlah Penduduk; DAU; DAK. Data diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan BPS.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif menggunakan grafik dan analisis regresi data panel. Analisis menggunakan grafik digunakan untuk mendeskripsikan Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan. Analisis regresi data panel digunakan untuk mengkaji pengaruh TPT, PDRB per kapita, IPM, DAU, dan DAK terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan. Model persamaannya bisa ditulis sebagai berikut.

$$TK_{it} = \beta_0 + \beta_1 TPT_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 PKPT_{it} + \beta_4 DAU_{it} + \beta_5 DAK_{it} + \varepsilon_{it}$$

dengan:

i	: seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan
t	: 2010-2019
TK	: Tingkat Kemiskinan
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
PKPT	: PDRB ADHK per kapita
DAU	: Dana Alokasi Umum yang diterima
DAK	: Dana Alokasi Khusus yang diterima
$\varepsilon$	: error
$\beta_0$	: intersep
$\beta_1-\beta_5$	: koefisien regresi

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan berfluktuasi dengan kecenderungan menurun mulai tahun 2010 hingga Bulan Maret Tahun 2020. Berdasarkan Tabel 1, Tingkat Kemiskinan terendah di Provinsi Kalimantan Selatan terjadi pada tahun 2020 sebesar 4,38 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 187.870. Penurunan tingkat kemiskinan hingga mencapai 4,38 persen pada tahun 2020 menjadikan Provinsi Kalimantan Selatan memiliki Tingkat Kemiskinan Terendah di Pulau Kalimantan (BPS, 2020).

Tabel 1. Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Selatan, 2010-2020

Tahun	Tingkat Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin
2010	5,21	181.963
2011	5,29	195.523
2012	5,06	190.694
2013	4,77	183.070
2014	4,68	182.876
2015	4,99	198.436
2016	4,85	195.700
2017	4,73	193.919
2018	4,54	189.033
2019	4,55	192.480
2020	4,38	187.874

Sumber: BPS, 2010-2020

Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar menjadi Kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan terendah di Provinsi Kalimantan Selatan selama 2010 sampai 2019 yaitu sekitar 2,84 - 3,34 persen.

Tingkat Kemiskinan terendah Kabupaten Banjar terjadi pada tahun 2013. Sedangkan Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki rata-rata Tingkat Kemiskinan tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sekitar 6,38 - 7,76 persen selama 2010 sampai 2019. Tingkat Kemiskinan tertinggi Kabupaten Hulu Sungai Utara terjadi pada tahun 2010.

Penentuan model regresi data panel terbaik yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Chow Test* dan *Hausman Test*. Setelah model terbaik diperoleh, selanjutnya dilakukan *Lagrange Multiplier Test* untuk mengetahui struktur varians dari kovarians residual. Pengujian selanjutnya yang digunakan yaitu pengujian asumsi klasik berupa pengujian asumsi normalitas dan multikolinieritas.

Langkah pertama yang dilakukan yaitu memilih model terbaik diantara *common effects* dan *fixed effects* menggunakan *Chow Test*. Langkah selanjutnya menggunakan *Hausman Test* dalam memilih model terbaik antara *random effects* dan *fixed effects*. Hasil dari *Chow Test* dan *Hausman Test* menunjukkan model terbaik yang terpilih adalah *fixed effect* dengan tingkat signifikansi 5 persen.

Langkah berikutnya adalah *LM Test* untuk memeriksa struktur varians kovarians residual apakah homoskedastis atau heteroskedastis. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan *LM Test*, dapat disimpulkan bahwa struktur varians kovarians residual bersifat heteroskedastis, sehingga estimasi yang lebih tepat digunakan adalah dengan menggunakan *cross section weight*. Pembobotan tersebut bisa digunakan ketika struktur varian kovarian residual yang dihasilkan dalam model bersifat heteroskedastis setelah dilakukan pengujian.

Sesudah mendapatkan model regresi data panel terbaik, dilanjutkan dengan pengujian asumsi normalitas dan

multikolinieritas untuk menunjukkan bahwa asumsi klasik tidak terlanggar. Hal tersebut karena model regresi yang digunakan merupakan alat estimasi terbaik dan unbiased jika residual terdistribusi normal dan tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen.

Pengujian asumsi normalitas dengan *Jarque-Bera Test* memperlihatkan bahwa residual yang dihasilkan terdistribusi secara normal. Hal tersebut ditunjukkan oleh *p-value* uji Jarque-Bera yang nilainya diatas dari tingkat signifikansi 5 (lima) persen. *Correlation matrix* digunakan dalam penelitian ini untuk menguji apakah ada multikolinieritas antar variabel independent dalam penelitian ini. Hasil *correlation matrix* menunjukkan seluruh korelasi antar variabel bebas dibawah 0,8. Korelasi antar variabel bebas dibawah ambang batas 0,8 menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel independen yang digunakan dalam model.

Setelah dilakukan beberapa pengujian seperti *Chow Test*, *Hausman Test*, *LM Test*, serta pengujian asumsi klasik, didapatkan model terbaik yang *fixed effect* dengan *Cross Section Weight*, dengan persamaannya:

$$TK_{it} = 16,69737^* + 0,0776 TPT^* - 0,1398^* IPM \\ - (4,77E - 08)^* PKPT \\ - (4,51E - 13) DAU \\ + (2,37E - 12)^* DAK$$

Adj R<sup>2</sup> = 0,9593; Prob (F-stat) = 0,0000

\*) Signifikan pada taraf 5 persen

Hasil pengolahan analisis regresi data panel dalam penelitian ini mendapatkan nilai koefisien determinasi atau R<sup>2</sup> *Adjusted* sebesar 0,9593. Hal ini dapat diartikan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, PDRB per kapita, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dapat mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 95,93 persen. Sedangkan sisanya sebesar 4,07 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Hasil pengujian F-statistik

menghasilkan angka yang sangat kecil dan kurang dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu lima persen menunjukkan hasil bahwa minimal terdapat satu variabel bebas yang dalam analisis ini yang memiliki pengaruh signifikan pada Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan.

Pengujian yang dilakukan pada masing-masing variabel menggunakan *t-test* menghasilkan temuan bahwa empat dari lima variabel independen yang digunakan dalam analisis memiliki pengaruh signifikan pada tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan dengan tingkat signifikansi lima persen. Hanya DAU yang tidak memiliki pengaruh signifikan pada tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan.

TPT mempunyai pengaruh signifikan pada Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan yang ditunjukkan dari hasil *p-value* 0,0002 atau dibawah tingkat signifikansi 0,05. Nilai koefisien dari TPT sebesar 0,0776 menunjukkan peningkatan nilai TPT sebesar satu persen akan berpengaruh pada peningkatan Tingkat Kemiskinan sebesar 0,0776 persen, *ceteris paribus*. Begitu juga sebaliknya, menurunnya TPT sebesar satu persen akan berpengaruh pada penurunan Tingkat Kemiskinan sebesar 0,0776 persen, *ceteris paribus*.

Akibat negatif yang tercipta dari adanya pengangguran adalah berkurangnya penghasilan suatu individu yang berdampak pada pengurangan tingkat kemakmuran suatu individu. Tingkat kemakmuran suatu individu yang semakin menurun akibat menganggur akan menyebabkan mereka tidak memiliki penghasilan sehingga dapat meningkatkan peluang untuk menjadi miskin (Sukirno, 2015). Hasil ini sejalan dengan temuan (Puspita, 2015), (Purnomo, 2019), dan (Susanti & Sartiyah, 2019) yang mengemukakan hasil bahwa terdapat pengaruh yang negatif serta signifikan

dari pengangguran terhadap kemiskinan.

IPM memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan yang dapat ditunjukkan dengan *p-value* di bawah tingkat signifikansi lima persen. Nilai koefisien IPM sebesar -0,1398 dapat diartikan meningkatnya IPM sebesar satu satuan akan mengakibatkan penurunan tingkat kemiskinan 0,1398 persen, *ceteris paribus*. Begitu juga sebaliknya, menurunnya IPM sebesar satu satuan akan mengakibatkan peningkatan Tingkat Kemiskinan sebesar 0,1398 persen, *ceteris paribus*.

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian (Pratama, 2015), (Purnomo, 2019), dan (Bakar, 2019) yang mendapatkan hasil bahwa IPM memengaruhi tingkat kemiskinan secara negatif, artinya nilai IPM yang semakin meningkat akan mengakibatkan semakin turunnya Tingkat Kemiskinan. Hal ini disebabkan semakin tinggi IPM maka masyarakat akan memiliki pendidikan, keterampilan dan kesehatan jasmani ataupun rohani sehingga mampu memiliki inovasi dan daya saing lebih tinggi. Peningkatan produktivitas yang terjadi diharapkan mempunyai dampak pada penurunan Tingkat Kemiskinan.

Hasil ini selaras dengan penelitian Arsyad (2010) yang menyatakan bahwa pembangunan SDM menjadi salah satu strategi menurunkan tingkat kemiskinan. Tingginya IPM akan sejalan dengan kualitas, kemampuan, serta produktivitas SDM. Meningkatnya produktivitas tersebut mampu meningkatkan kemakmuran masyarakat, sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan.

PDRB per kapita mempunyai pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan yang ditunjukkan dengan nilai *p-value* 0,0023 atau dibawah tingkat signifikansi 5 persen. Nilai koefisien PDRB per kapita sebesar - (4,77 E-08) dapat diartikan meningkatnya PDRB per kapita setahun sebesar satu juta rupiah akan berpengaruh

terhadap penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,0477 persen, *ceteris paribus*. Begitu juga sebaliknya, menurunnya PDRB per kapita setahun sebesar satu juta rupiah akan berpengaruh terhadap peningkatan Tingkat Kemiskinan sebesar 0,0477 persen, *ceteris paribus*.

Hasil temuan penelitian ini sesuai temuan (Sari, 2018); (Azizah et al., 2018); (Bhattacharyya & Resosudarmo, 2015)(Bhattacharyya & Resosudarmo, 2015); dan (Suryahadi et al., 2009) yang menghasilkan bahwa PDRB per kapita memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan. PDRB per kapita dapat digunakan sebagai parameter kemakmuran masyarakat di daerah tersebut. Jika PDRB per kapita mengalami peningkatan, maka masyarakat dapat mencukupi keperluan dasarnya dengan mudah sehingga akan menurunkan kemiskinan. Kebijakan pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan ruang bebas bagi pelaku ekonomi di daerah, sehingga efek yang dihasilkan dapat mengembangkan kapasitas ekonomi masyarakat serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, strategi pembangunan harus diupayakan dapat menggali potensi ekonomi daerah sehingga pertumbuhan yang terjadi akan menghasilkan PDRB per kapita yang merata dan memiliki manfaat yang besar dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

DAU tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan yang ditunjukkan oleh nilai *p-value* 0,1574 atau mempunyai nilai yang lebih besar dari tingkat signifikansi lima persen. Hal ini berkebalikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ismail & Hakim, 2014) yang mengemukakan bahwa DAU mempunyai pengaruh berkebalikan dan signifikan kepada tingkat kemiskinan. Pada Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi agar DAU dapat lebih efektif

digunakan untuk mengurangi Tingkat Kemiskinan. Pemerintah sebaiknya memprioritaskan alokasi DAU pada sektor yang dapat berkaitan secara langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

DAK mempunyai pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan yang ditunjukkan oleh nilai *p-value* yang mendekati 0 atau kurang dari tingkat signifikansi lima persen. Koefisien DAK bernilai (2,37 E-12) menunjukkan meningkatnya DAK sebesar 10 miliar rupiah akan menambah Tingkat Kemiskinan 0,027 persen, *ceteris paribus*. Begitu juga sebaliknya, menurunnya DAK sebesar 10 miliar rupiah akan mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 0,027 persen, *ceteris paribus*. Hasil tersebut selaras dengan penelitian Widiyanto et al., (2016) dan Ismail & Hakim (2014) yang menemukan hasil ada pengaruh positif DAK dengan jumlah kemiskinan di Provinsi Bali. Hubungan yang positif menunjukkan DAK masih belum didesain untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil analisis yang dilakukan menggunakan Regresi Data Panel dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa PDRB per kapita, IPM, TPT, dan DAK mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2010-2019. PDRB per kapita dan IPM memiliki pengaruh negatif yang berarti kenaikan PDRB per kapita dan IPM akan menyebabkan turunnya tingkat kemiskinan. Sedangkan TPT dan DAK memiliki pengaruh positif yang berarti kenaikan TPT dan DAK akan diikuti oleh kenaikan tingkat kemiskinan. Sedangkan DAU tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah dapat melaksanakan kebijakan sebagai berikut: (1) Meningkatkan

pelayanan dan fasilitas kesehatan maupun pendidikan supaya dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. (2) Fokus mengembangkan sektor padat karya seperti pertanian ataupun industri pengolahan. Hal ini dikarenakan sebagian besar orang miskin di Kalimantan Selatan berada di perdesaan dengan sektor utama pertanian dan industri mikro kecil sehingga dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan PDRB perkapita. Oleh karena itu, kebijakan tersebut akan memiliki pengaruh yang besar terhadap penurunan tingkat kemiskinan. (3) Membuat implikasi kebijakan untuk memprioritaskan alokasi dana umum ke bidang yang langsung bersentuhan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Azizah, E. W., Sudarti, & Kusuma, H. (2018). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 167–180.
- Bakar, A. (2019). Analisis Determinan Kemiskinan Di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*, III(1), 1–23. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/5427>
- Bhattacharyya, S., & Resosudarmo, B. P. (2015). Growth, Growth Accelerations, and the Poor: Lessons from Indonesia. *World Development*, 66, 154–165. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.08.009>
- Handalani, R. T. (2019). Determinant of Poverty in Indonesian's Province: A Review of Public Policy. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(1), 59–80. <https://doi.org/10.24258/jba.v15i1.373>
- Ismail, A., & Hakim, A. (2014). Peran Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 16(9), 2168. <https://doi.org/10.20885/jabis.vol16.iss9.art8>
- Paramita, A. A. I. D., & Purbadharmaja, I. B. P. (2015). Pengaruh Investasi dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(10), 1194–1218.
- Pateda, Y., Masinambouw, V. A. J., & Rotinsulu, T. O. (2017). Pengaruh Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Gorontalo. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(3), 1–17.
- Pratama, Y. C. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia. *Esensi*, 4(2), 210–223. <https://doi.org/10.15408/ess.v4i2.1966>
- Purnomo, S. D. (2019). Determinan kemiskinan di provinsi daerah istimewa yogyakarta. *FORUM EKONOMI*, 21(2), 217–225.
- Puspita, D. W. (2015). Analisis Determinan Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. *Jejak*, 8(1), 100–107. <https://doi.org/10.15294/jejak.v8i1.3858>
- Salindeho, C. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 4(3), 705–716.
- Sari, N. I. (2018). Determinan Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 – 2014. *Economics Development Analysis Journal*, 7(2), 128–136.

<https://doi.org/10.15294/edaj.v8i2.23411>

- Škare, M., & Družeta, R. P. (2016). Poverty and Economic Growth : a Review. *Technological and Economic Development of Economy*, 22(1), 156–175. <https://doi.org/10.3846/20294913.2015.1125965>
- Sukirno, Sadono. 2015. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: Grafindo Persada.
- Suryahadi, A., Suryadarma, D., & Sumarto, S. (2009). The effects of location and sectoral components of economic growth on poverty: Evidence from Indonesia. *Journal of Development Economics*, 89(1), 109–117. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2008.08.003>
- Susanti, E. N., & Sartiyah, S. (2019). Determinan Kemiskinan Di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Dimensi*, 8(2), 249–265. <https://doi.org/10.33373/dms.v8i2.2156>
- Widianto, A., Sedyah, U., & Langgeng Nurmansyah, A. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Tegal). *Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, Vol. 5(No. 2), 170–176. <http://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/monex/article/view/417>